

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAN  
KETERGANTUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh:  
Miftahul Qaira  
18133057**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

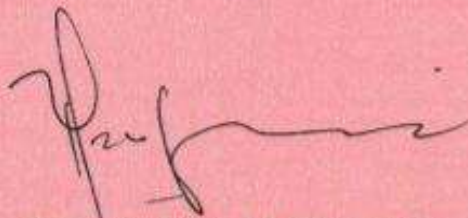
**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAN KETERGANTUNGAN**  
**KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nama** : Miftahul Qaira  
**BP/NIM** : 2018/18133057  
**Program Studi** : Akuntansi (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

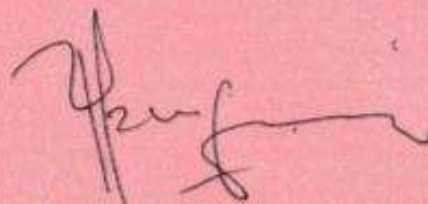
Padang, Februari 2022

Diketahui Oleh:  
Koordinator Program DIII Akuntansi

Disetujui Oleh:  
Pembimbing



**Halkadri Fitra, SE,MM,Ak,CA**  
**NIP. 19800809 201012 1 003**



**Halkadri Fitra, SE,MM,Ak,CA**  
**NIP. 19800809 201012 1 003**



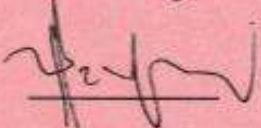

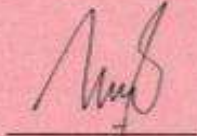
**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAN KETERGANTUNGAN**  
**KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nama** : Miftahul Qaira  
**BP/NIM** : 2018/18133057  
**Program Studi** : Akuntansi (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2022

Tim penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Halkadri Fitra, SE,MM.Ak,CA	
Anggota	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	
Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE, M.si	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Qaira  
Thn. Masuk/NIM : 2018/18133057  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Rasian / 19 Februari 2001  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Desa Ujung Padang Rasian  
Hp : 082272950717

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Miftahul Qaira

BP/NIM. 2018/18133057

## ABSTRAK

**Miftahul Qaira : Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian**

**Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat**

**Pembimbing : Halkadri Fitra, SE,MM,Ak,CA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Kemandirian dan Ketergantungan keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2016 - 2020 terdapat permasalahan yaitu 1) Penerimaan pendapatan transfer yang masih tinggi 2) Kurangnya usaha pemerintah dalam mengelola dan menggali secara maksimal sumber Pendapatan daerah 3) Pendapatan asli daerah tidak tergarap secara maksimal di berbagai sector. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat Jl Khatib Sulaiman No 54 Ulak Karang Sel, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, 25173. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari : 1) Rasio ketergantungan keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumatera barat dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata 2016 sebesar 88,2%, pada tahun 2017 sebesar 84,5%, pada tahun 2018 sebesar 83,7%, pada tahun 2019 sebesar 85,4%, pada tahun 2020 sebesar 84,4% dengan kriteria penilaian sangat tinggi 2) Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata pada tahun 2016 sebesar 12,7%, pada tahun 2017 sebesar 16,8%, pada tahun 2018 sebesar 15,1%, pada tahun 2019 sebesar 14,8%, dan pada tahun 2020 sebesar 15,5% dengan kriteria penilaian Rendah Sekali.

**Kata kunci:** Kinerja, Keuangan, Ketergantungan, Kemandirian

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah, serta pertolongan yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan judul: **“Analisis Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat”** tepat pada waktunya, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh muslim seluruh penjuru dunia. Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Progra Studi Diploma III Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sudah banya mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancarn disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Salmi Andy (Alm), Ibunda Nurbaiti, abang Roynisfan, Suwitri Herivarera, dan kakak Oshin serta kelurga besar yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moral maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini

3. Bapak Dr. Idris M.si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra SE,MM,Ak,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Ibuk Mia Angelina Setiawan SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak/Ibuk dosen serta Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.
6. Untuk kakak saya Oshin, terimakasih untuk semuanya, terimakasih sudah mendukung sejak awal, mendukung apapun yang peneliti lakukan, memberikan suatu tempat untuk “pulang” Ketika peneliti mulai kehilangan arah, terimakasih atas kesabaran dan dukungan mental kepada peneliti.
7. Tim sukses yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir Richi, Amel, Indah, Fikri, Hifni, Izzah, Ibnu, Annisa, Fasha dan Rama, Yunus, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu sukses untuk kita semua. Aamiin YaAllah.

8. Semua teman -teman seperjuangan khusus Diploma III Akuntansi 2018 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Untuk Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang tergabung dalam Groub BTS yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
10. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting for just being me at all time

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan seluruh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 17 Januari 2022

Miftahul Qaira



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II.....	9
KAJIAN TEORI .....	9
A. Otonomi Daerah.....	9
B. Kinerja Keuangan Daerah.....	10
C. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota .....	18
D. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	19

E. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .....	21
BAB III .....	23
PENDEKATAN PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Rancangan Penelitian .....	24
D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV .....	28
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Objek penelitian .....	28
B. Pembahasan.....	37
BAB V.....	51
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Selain Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat Tahun 2017-2019 .....	5
Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian Daerah.....	20
Tabel 2.2 Tingkat Ketergantungan Daerah .....	22
Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota di Sumatera Barat .....	46
Tabel 4.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota di Sumatera Barat.....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Tahun 2016-2020

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi Tahun 2016-  
2020

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun  
2016-2020

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Kota Pariaman Tahun 2016-2020

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2016-  
2020

Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Kota Solok Tahun 2016-2020

Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Kota Sawahlunto Tahun 2016-  
2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam Kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik khususnya reformasi Manajemen keuangan daerah. Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban, dan wewenang serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengatur, mengurus, dan mengelola pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Halim,2010). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.



Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah (2) mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah (3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah (5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah lainnya (Halim,2007).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel (Mardiasmo, 2002: 169). Ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas

pemerintah daerah diantaranya Rasio Kemandirian keuangan daerah dan Rasio Ketergantungan keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2001). Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim,2007). Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah/provinsi terhadap pemerintah pusat.

Melalui Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat, pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu yang diberikan hak otonomi daerah, Untuk menjalankan otonomi daerah pemerintah mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah untuk kelangsungan dan kemajuan Provinsi Sumatera Barat. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah kota di Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota diantaranya ialah Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Solok. Berikut ini adalah tabel Pendapatan Asli Daerah dan jumlah pendapatan selain pendapatan asli daerah Kota di Sumatera Barat.

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020**

No	Keterangan	Pendapatan Asli Daerah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Bukittinggi	Rp.71.303.7817.35	Rp.102.375.931.332	Rp.101.936.792.226	Rp.111.896.596.611	Rp.84.087.662.500
2	Kota Padang	Rp.391.925.662.646	Rp.548.653.179.266	Rp.487.937.852.411	Rp.546.108.570.689	Rp.499.895.722.726
3	Kota Padang Panjang	Rp.70.357.124.066	Rp.88.837.033.624	Rp.79.752.372.829	Rp.77.323.150.456	Rp.79.428.802.696
4	Kota Pariaman	Rp.29.680.784.157	Rp.30.881.846.112	Rp.32.213.303.036	Rp.36.665.174.233	Rp.32.961.765.488
5	Kota Payakumbuh	Rp.87.445.115.902	Rp.116.596.479.804	Rp.94.287.442.042	Rp.104.070.234.422	Rp.115.996.425.752
6	Kota Sawahlunto	Rp.53.388.553.982	Rp.62.459.787.921	Rp.47.227.132.335	Rp.57.170.993.865	Rp.59.537.385.897
7	Kota Solok	Rp.42.117.207.737	Rp.41.852.774.058	Rp.40.742.809.270	Rp.41.651.875.802	Rp.40.546.983.369

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat pendapatan asli daerah tiap kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun dari tahun 2016 sampai

dengan 2020, Kota Padang merupakan kota dengan Pendapatan Asli Daerah paling tinggi, dan Kota Pariaman merupakan kota dengan Pendapatan Asli Daerah terendah dibandingkan dengan kota-kota yang lain.

**Tabel 1.2 Pendapatan Transfer Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020**

No	Keterangan	Jumlah Penerimaan selain Pendapatan Asli Daerah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Bukittinggi	Rp.575.741.940.120	Rp.550.998.955.857	Rp.578.916.555.544	Rp.607.228.300.285	Rp.585.094.336.619
2	Kota Padang	Rp.1.538.594.662.970	Rp.1.524.189.578.021	Rp.1.570.187.030.067	Rp.1.696.988.903.351	Rp.1.551.955.503.097
3	Kota Padang Panjang	Rp.479.579.235.757	Rp.502.225.856.055	Rp.466.585.198.317	Rp.492.851.788.491	Rp.460.593.650.000
4	Kota Pariaman	Rp.591.854.393.894	Rp.551.363.249.132	Rp.582.874.314.778	Rp.624.536.538.612	Rp.586.837.360.678
5	Kota Payakumbuh	Rp.626.587.520.595	Rp.621.597.821.589	Rp.591.819.046.982	Rp.672.960.290.170	Rp.583.260.279.926
6	Kota Sawahlunto	Rp.532.746.888.449	Rp.522.257.503.732	Rp.458.504.259.105	Rp.571.997.269.623	Rp.497.369.022.340
7	Kota Solok	Rp.529.889.403.310	Rp.542.153.975.616	Rp.513.726.694.440	Rp.561.657.134.687	Rp.493.494.729.310

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan Sumatera Barat, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat pendapatan Transfer pada Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020. maka dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun berturut-turut pendapatan Transfer di kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat meningkat tiap tahunnya, Namun hal tersebut belum menggambarkan bagaimana rasio kemandirian dan rasio ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2020, apakah rasio kemandirian dan ketergantungan mengalami peningkatan atau penurunan dan masuk kedalam kategori manakah rasio kemandirian dan ketergantungan serta bagaimana kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis kemandirian dan ketergantungan keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian sangat penting sekali dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan mengukur kontribusi masing-masing

sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya. Namun, dalam menggambarkan kinerja keuangan daerah tidak hanya dilihat dari jumlah saja tetapi dilihat dari persentase perbandingan yaitu perbandingan pendapatan transfer dengan pendapatan daerah yang disebut rasio ketergantungan atau kinerja kemandirian yang dilihat dari pendapatan asli daerah dengan transfer. Dengan melakukan perbandingan tersebut, dapat dilihat kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota Apakah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan tingkat ketergantungan yang rendah, apakah pemerintah telah berhasil memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah yang ada, serta apakah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tersebut mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, penulis merasa perlu dilakukannya analisis rasio ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kota di provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 - 2020.

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kota di Provinsi Sumatera Barat lebih Komprehensif berdasarkan kemandirian dan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kota di Provinsi Sumatera Barat, penulis memilih kota dikarenakan dalam hal kepadatan penduduk, wilayah kota cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten, sehingga fasilitas umum, wahana bermain dan layanan masyarakat yang di sediakan pun lebih banyak dan unggul karena hal itu juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah karena kepadatan penduduk, banyaknya fasilitas



umum, dan banyaknya wahana permainan juga berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota di Sumatera Barat berdasarkan Rasio Kemandirian pada tahun 2016-2020?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota di Sumatera Barat berdasarkan Rasio Ketergantungan pada tahun 2016 – 2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat Kemandirian keuangan daerah pada Kota di Sumatera Barat pada periode 2016 – 2020.
2. Untuk menganalisis tingkat Ketergantungan keuangan daerah pada Kota di Sumatera Barat pada periode 2016– 2020

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pemerintah daerah dan pihak lain yang membaca hasil penelitian ini.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk menemukan bukti empiris tentang kemandirian keuangan pemerintah daerah yang diteliti.
- b. Sebagai sarana untuk teori dan perhitungan akuntansi yang sudah dipelajari selama perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis Ketergantungan dan Kemandirian keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan masukan kepada pembaca dan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.